

Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru

Implementation Of Teacher Certification Program Policy

Rifqi Khairul Arifin

Universitas Pasundan Bandung
Jl. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
40117

*corresponding author E-mail : rifqyarifin88@gmail.com

Diterima: 30 Oktober 2019 ; Direvisi: 27 November 2019 ; Disetujui: 2 Desember 2019

ABSTRAK

Genderang kebijakan sertifikasi sudah dimulai sejak tahun 2006 dimaksudkan untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional dimana Indonesia pada tahun 2015 menurut laporan pisa indonesia berapa peringkat 62 dari 72 negara, dengan adanya kebijakan ini diharapkan tingkat pendidikan menjadi semakin baik yaitu dengan dimulainya dari peningkatan kompetensi guru. teori yang digunakan Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yaitu melihat Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana. Metode yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kalimat tertulis bukan angka dan sifatnya kontekstual. Di Kabupaten Majalengka program sertifikasi masih berjalan dengan baik hanya saja masih ditemukan beberapa kesalahan teknis yaitu kurang siapnya operator dan kurang mengetahuinya guru akan persyaratan pencairan sertifikasi. menggunakan metode kualitatif dengan Studi kasus terhadap 2 Sekolah Dasar di Kabupaten Majalengka yang menghasilkan bahwa program sertifikasi sudah berjalan dengan baik hanya saja masih kurang pada indikator struktur birokrasi dan komunikasi.

Kata Kunci : Sertifikasi, Kebijakan, Kabupaten Majalengka.

ABSTRACT

The certification policy drum has been started since 2006 intended to improve the national education sistem where Indonesia in 2015 according to the Indonesian Pisa report ranks 62 out of 72 countries, with this policy it is expected that the level of education will be better, namely the start of increasing teacher competence. The theory used by Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli is looking at Environmental Conditions, Relationships between Organizations, Organizational Resources, Characteristics and Capabilities of Implementing Agencies. The method used by researchers is to use a qualitative approach to

have research procedures that produce descriptive data in the form of oral or written sentences instead of numbers and contextual nature. In Majalengka District, the certification program is still going well, but there are still some technical errors, namely the lack of operator readiness and the teacher's lack of knowledge about the requirements for certification disbursement. Using a qualitative method with a case study of 2 elementary schools in Majalengka that resulted in the certification program running well but still lacking in indicators of the bureaucratic structure and communication.

Keywords: Certification, Policy, Majalengka Regency.

PENDAHULUAN

Dengan adanya kebijakan sertifikasi guru Indonesia memulai suatu langkah yang strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dimana dengan terjadinya perkembangan pada pendidikan itu mengakibatkan majunya peradaban manusia (Rukiyati, 2013). Program sertifikasi guru adalah cara pemerintah untuk guru agar semakin berkualitas, mempunyai kompetensi yang baik serta dapat membantu kondisi perekonomian guru. Program sertifikasi dimulai dari Undang – Undang No.20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, Undang – Undang R.I No.14 Tahun 2005, PP No.74 Tahun 2008, PP No.41 Tahun 2009, Peraturan Menteri No.16 Tahun 2007 dan peraturan Menteri No.11 tahun 2011 (Anwar & Rahmayanti, 2015).

Program sertifikasi Guru sudah dimulai sejak tahun 2006 perencanaan, mensosialisasikan, menguji kompetensi dan untuk pendataan telah dilakukan sejak tahun 2006 berdasarkan data masih ada sekitar 570 ribu guru yang belum mendapatkan sertifikasi. (Wibowo, 2018) sertifikasi dalam KBBI surat keterangan (sertifikat) dari lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan yang ditunjuk oleh pemerintah dimana menunjukkan kompetensi seseorang menyatakan bahwa seseorang itu layak menjalankan tugasnya sesuai dengan profesi yang dia tekuni. Untuk mendapati sertifikasi ini guru haruslah memiliki kualifikasi akademik S1/d4 dan berkompetensi minimal sebagai guru dimana kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik (SERDIK).

Mutu dari pendidikan kita sampai saat ini masih belum dapat dikatakan baik, sejak adanya kebijakan sertifikasi kualitas pendidikan di Indonesia sedikit – sedikit semakin membaik hasil uji kompetensi di tahun 2012 kurang

memuaskan nilai rata – rata dari ujian kompetensi guru hanya di angka 44,5.(Baswedan, 2014) Ditahun 2015 menurut laporan PISA Indonesia berada diperingkat 62 dari 72 negara, sedangkan pada tahun 2018 yang dilansir dari Deutsche Welle Indonesia berada pada peringkat kelima dalam negara-negara ASEAN untuk terus berkembang dan melewati negara lainnya tentu tidak mudah diperlukannya upaya – upaya dari pemerintah untuk dapat mengembangkan pendidikan di Indonesia menurut Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan UIN Jakarta bapak Jejen Musfah ada lima budaya di Indonesia yang harus sesegera mungkin untuk di rubah yaitu budaya Mencontek, budaya asal-asalan dapat dibilang tidak mementingkan mutu, budaya mempersulit dan lamban, Budaya gila gelar serta jabatan dan budaya manipulasi (M Nur Ali, 2018). Dari upaya-upaya tersebut kebijakan sertifikasi dapat menjadi solusi dari mengubah budaya bangsa Indonesia yang kurang baik hanya saja masih ada beberapa guru yang belum mengerti dengan baik bagaimana mengurus pencairan sertifikasi guru seperti masih terjadinya berkas administrasi yang kurang lengkap yaitu SK beserta berkas yang dipersyaratkan tidak lengkap, berkas kurang, salah dalam menyiapkan berkas yang diminta dan keterlambatan dalam pengumpulan berkas. Kesalahan tersebut cukup sering terjadi di sekolah-sekolah yang memiliki operator sekolah yang masih belum paham tentang prosedur sertifikasi dan kurang cermat dalam filling dokumen, kesalahan penginputan data dapat berimbas pada terlambat bahkan tidak cairnya sertifikasi guru bersangkutan sayangnya kejadian kesalahan penginputan data lebih banyak diketahui setelah pencairan sertifikasi dan guru yang salah dalam data tidak mendapatkan uang sertifikasi tersebut (Kompasiana, 2018). Contohnya dua orang kepala sekolah dasar didaerah kabupaten majalengka tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi pada TW 1 dan TW 2 pada tahun 2016 dikarenakan ada kesalahan penginputan sehingga data didapodiknya tidak cocok keduanya merupakan mutasi dari sekolah lain dimana data didapodik sekolah lama sudah

dikeluarkan sedangkan data di dapodik sekolah baru mengalami kekeliruan dan operator sekolah tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka terdapat kendala Sertifikasi Guru SD yaitu sebagai berikut :

1. SKTP terlambat diterima dari kemendikbud yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran TPG
2. Data validitas SKTP bersumber dari dapodik sekolah, banyak ditemukan data yang tidak valid sehingga SKTP telat diterbitkan oleh kemendikbud.
3. Kurangnya perencanaan pegawai yaitu banyaknya guru yang bekerja membuat ada beberapa guru yang tidak mendapat 24 jam sebagai salah satu syarat memperoleh sertifikasi Dan berikut ini tabel rekapitulasi guru yang bersertifikat pendidik di Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka sebagai berikut :

Tabel 1. Guru SERDIK KAB. Majalengka 2016

Jenjang	Status Kepegawaian		Sudah Sertifikasi		Belum Sertifikasi	
	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
SD	3967	2204	3786	5	181	0
SMP	1586	665	1413	28	173	0
SMA	575	169	505	14	70	0
SMK	366	951	285	99	81	0
Jumlah	6494	3989	5989	146	505	0

Sumber : Dinas Pendidikan KAB.Majalengka 2016

Dari data diatas bahwa guru PNS SD yang paling banyak yang sudah sertifikasi Guru dengan jumlah 3.786 orang dari total semuanya 3,967 orang dan juga paling banyak yang belum dapat sertifikasi dengan jumlah 181 orang. Dan dari data diatas juga bahwa guru NON PNS di kabupaten Majalengka masih banyak yang belum dapat sertifikat pendidik dari 5.989 orang hanya 505 orang yang mendapat sertifikasi guru. Dan juga Dinas Pendidikan KAB. Majalengka tidak mengetahui jumlah orang NON PNS yang belum dapat sertifikasi guru. Menurut Bapak H. Dadang Staf Kepegawaian Dinas Pendidikan KAB. Majalengka. “ Bahwa Dinas Pendidikan KAB. Majalengka tidak mengetahui Guru Non PNS yang sudah dan belum mendapatkan Sertifikasi Guru”.

Penelitian Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di SMA N Jatibarang dan SMA N 1 Juntinyuat Kab. Indramayu. Tujuan penelitian adalah menganalisa penerapan kebijakan sertifikasi guru di SMA N 1 Jatibarang dan SMA N 1 Juntinyuat Kab. Indramayu dengan faktor-faktor interaktif yang dikemukakan George C Edward III yaitu Sumberdaya ,Disposisi, Komunikasi dan Struktur Birokrasi yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan studi kasus dipergunakan dalam penelitian ini. Dengan Subjek penelitiannya merupakan staf Dinas Pendidikan Kab.Indramayu, Kepala sekolah, guru dan staf tata usaha SMA N 1 Jatibarang dan SMA N 1 Juntinyuat Kab. Indramayu. Dengan teknik dokumentasi dan wawancara.

Oktora Melansa yang juga meneliti tentang implementasi kebijakan sertifikasi pada guru di SMA N 1 Jatibarang dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Juntinyuat Kab. Menggunakan Edward III hanya saja belum sempurna yaitu Struktur birokrasi dan komunikasi adalah bagian belum baik dalam penerapan kebijakan sertifikasi. komunikasi dalam memberikan informasi adalah salah satu gangguan dikarenakan banyaknya tahapan dalam proses sertifikasi serta informasi yang belum baik membuat guru melakukan beberapa kesalahan. Untuk itu perlu dibuatnya suatu SOP yang lebih kuat dan ramping dalam birokrasi.

Dialog interaktif antar pelaksana kebijakan beserta guru yang menjadi sasaran program merupakan suatu alternatif untuk komunikasi yang terganggu. SOP yang konsisten adalah hal mutlak untuk segera diperbaiki agar tidak membuat kesalahan – kesalahan yang terjadi akibat belum jelasnya SOP yang berlaku (Subhan, 2012). Mengambil tema Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi guru pada SDN pada Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur. Menggunakan fullan merupakan faktor perubahan, karakteristik dan pemerintah yang dinantinya akan ditemukan factor yang paling dominan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. menghasilkan bahwa pihak terkait yang ikut pada implementasi kebijakan seharusnya lebih peduli dengan

kebutuhan serta kejelasan maksud yang ada pada kebijakan sertifikasi guru. Rencana yang matang, koordinasi yang efektif ditambah kinerja yang baik dari pemerintah untuk mengimplementasikan sertifikasi guru harus dilakukan (Oktora Melansa, 2015).

Penelitian Hasan Subhan Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementas. Kebijakan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah baik, akan tetapi masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi secara bersama-sama. dapat dilihat dari hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan yaitu berikut ini: Pertama, Keadaan kondisi lingkungan di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah baik. Terbukti dengan pendapat Informan tentang status sosial dan struktur sosial tidak dibedakan dalam pengurusan Sertifikasi. Dinas Pendidikan dan para dan aparatur yang didalamnya selalu berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan kebijakan sertifikasi guru. Sistem sosial yang diterapkan oleh Instansi sudah berjalan dan budaya kerja sudah bisa diikuti oleh aparatur setempat, namun kekurangannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Kedua, hasil wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa indikator hubungan antar organisasi untuk Implementasi Kebijakan tentang Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kab. Majalengka sudah baik. Tetapi meskipun sudah ada pola kerjasama terkait Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar pada tahap pelaksanaan masih lemah dalam segi pengawasan. Pola Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar masih belum merata terdapat perbedaan antara satu instansi dengan instansi yang lain. Untuk mengatasi hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka melakukan komunikasi secara intens untuk melakukan kerjasama yang lebih baik dalam dana Sertifikasi. Ketiga, dari hasil wawancara bersama responden dan pengamatan secara langsung bisa disimpulkan bahwa dimensi sumber daya untuk Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, bahwa Sumber Daya Manusia Dinas

Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah mengerti dalam kebijakan sertifikasi guru yang ditunjang oleh pengalaman dalam program ini. Keempat, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana implementasi kebijakan khususnya dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah bagus. Meskipun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan dana Sertifikasi dengan baik. Diantara pola hubungan antar unit kerja dan norma-norma yang berlaku harus lebih ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Agar setiap tanggung jawab dan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari masalah-masalah khususnya masalah implementasi kebijakan sertifikasi.

Dari kedua Penelitian tersebut artikel ini memfokuskan pada implementasi kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Dasar Negeri Cimeong KEC. Banjaran dan Sekolah Dasar Negeri Ganeas 2 KEC. Talaga KAB Majalengka dimana disana berdasarkan survey awal masih terdapat masalah sertifikasi guru SD yaitu : Kelebihan guru kelas, agama dan olahraga yang mengakibatkan seorang guru kelas, agama dan olahraga kekurangan jam mengajar serta ditemukannya ada ijazah yang tidak linear dimana salah satu syarat mendapat sertifikasi yaitu ijazah harus linear dan mendapat nilai UKG 7.0.

Untuk itu penulis membuat tulisan untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi kebijakan sertifikasi guru studi kasus pada Sekolah dasar negeri Cimeong dan Sekolah Dasar Negeri 2 Ganeas Kabupaten Majalengka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan hasil – hasil temuan peneliti secara mendalam diungkapkan dalam sebuah narasi. Dengan teknik pengambilan data yang terdiri dalam wawancara dan studi dokumentasi. Kriteria informan

didasarkan atas pengalaman, keterlibatan atau mengetahui dengan pasti mengenai obyek yang sedang diteliti. Informan yang dapat dipandang kompeten dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti, diantaranya :

Tabel 2. Informan

Informan	Sebagai
Kepala Bagian Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka	Key Informan
1. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka 2. Staff Kepegawaian 3. Kepala Sekolah SDN Ganeas II Guru SDN Cimeong	Pendukung

Sumber : diolah peneliti 2018

Dengan pengujian menggunakan teknik triangulasi yaitu berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Difokuskan dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dimana menentukan variabel – variabel yang relevan untuk di teliti, disini peneliti akan mengemukakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Oktamia & Fauziah, 2018). Dimana mengemukakan: Kondisi Lingkungan, Mencakup lingkungan Kultural sosiologi serta tempat seseorang menerima kebijakan. Hubungan Antar Organisasi, kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait dalam mencapai tujuan bersama yaitu keberhasilan implementasi kebijakan Sumber daya Organisasi, sumber daya yang dimiliki instansi terkait yaitu berkompeten dan fasilitas yang memadai. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yaitu cakupannya berupa struktur birokrasi, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi pada birokrasi yang nantinya akan mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Pandangan di atas, tampak bahwa proses/teknik implementasi Sertifikasi guru sekolah dasar sangat berkaitan dengan tercapainya guru yang berkualitas.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

SDN Cimeong dan SDN Ganeas II

Mutu pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan baik dan berkualitas bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang dengan pelan – pelan namun pasti telah meninggalkan Indonesia dalam kualitas pendidikan sebuah bangsa. Contoh sederhana adalah Malaysia yang dulu banyak mengimpor tenaga pendidik dari Indonesia namun sekarang telah mampu secara mandiri melaksanakan pendidikan secara berkualitas untuk warga negaranya. Bicara tentang kualitas pendidikan, kita tidak lepas dari sosok guru sebagai orang yang mengabdikan dirinya dalam dunia Pendidikan. Di Salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Majalengka terdapat guru – guru yang masih kesulitan mengikuti program sertifikasi guru seperti data yang penulis dapatkan di SDN Cimeong dan SDN Ganeas II Kabupaten Majalengka. Berikut ini tabel rekapitulasi guru yang bersertifikat di SDN Cimeong dan SDN Ganeas II sebagai berikut :

Tabel 3. Guru SERDIK SDN Cimeong Kecamatan Banjaran dan SDN Ganeas II Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2018

Nama SD	Status Kepegawaian		Sudah sertifikasi	Belum Sertifikasi
	PNS	NON PNS		
SDN Cimeong	10	6	9	6
SDN Ganeas	9	1	9	1

Sumber : Sumber SDN Cimeong dan SDN Ganeas II 2018

Dari data diatas bahwa masih ada yang belum sertifikasi guru di SDN Cimeong Jumlah Guru 16 yang belum sertifikasi 6 dan yang sudah sertifikasi 9 dan di SDN Ganeas II jumlah guru 10 yang belum sertifikasi 1 dan yang sudah sertifikasi 9. Bahwa yang paling banyak yang belum sertifikasi guru di SDN cimeong dengan jumlah 6 orang guru.

Indikator masalahnya bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan khususnya pada kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar pada Dinas pendidikan KAB. Majalengka cukup baik hanya saja ada beberapa yang harus dikaji lebih dalam agar implementasi

kebijakan sertifikasi guru dapat berjalan sesuai prosedur tanpa ada kendala yang diluar kendali.(Oktamia & Fauziah, 2018)

Melalui karakteristik kebijakan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan sertifikasi dilihat dari aturan sertifikasi pemerintah pusat yang dikeluarkan pada peraturan menteri No.11 Tahun 2011 mengenai sertifikasi guru dalam jabatan sedangkan pada tingkat daerah masih belum mempunyai peraturan daerah mengenai sertifikasi guru serta banyaknya guru yang tidak linear berpotensi menjadi masalah yang cukup besar kedepannya (Sunartono, 2017).

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di suatu instansi pemerintahan tentunya sangat memerlukan sistem dan mekanisme yang baik. Untuk menghasilkan guru guru yang profesional yang baik ini harus ada sistem kerja yang baik. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana dan konsistensi. Tidak terkecuali di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (studi pada SDN cimeong dan SDN Ganeas II).

Dimensi Kondisi Lingkungan

Keadaan kondisi lingkungan di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, SD Negeri Cimeong dan SD Negeri 2 Ganeas sudah baik. Hal ini dibuktikan dari pendapat Informan bahwa kondisi sosial, kultural dan penerima program dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar sudah baik dan cenderung memberikan kondisi lingkungan yang kondusif. Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dan para aparatur yang didalamnya sudah berusaha melalui kegiatan-kegiatan dalam mengelola dana Sertifikasi. Sistem sosial yang diterapkan oleh Instansi Dinas Pendidikan sudah berjalan dan budaya kerja sudah bisa diikuti oleh aparatur Dinas Pendidikan, namun masih ada kekurangan perlu ditingkatkan agar tidak berdampak kepada situasi lingkungan yang tidak kondusif.

Dimensi Hubungan antar Organisasi

Dari hasil wawancara bersama Informan bisa disimpulkan bahwa dimensi hubungan antar organisasi untuk Implementasi Kebijakan sertifikasi guru tentang Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah berjalan sesuai ketentuan. Hubungan kerjasama Dinas Pendidikan dengan instansi lainnya terkait dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar sudah berjalan baik, baik dengan Kemendikbud atau instansi lainnya. Meskipun sudah ada pola kerjasama terkait Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar tapi dalam tahap pelaksanaan masih lemah dalam segi pengawasan terutama pengawasan internal. Untuk mengatasi hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka melakukan komunikasi secara intens dalam melakukan kerjasama yang lebih baik dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar ini.

Dimensi Sumber Daya

Dari hasil wawancara bersama Informan bisa disimpulkan bahwa dimensi sumber daya untuk Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah memiliki kuantitas SDM yang cukup secara jumlah dan pengalaman yang cukup lama sehingga dalam kebijakan sertifikasi guru sudah tidak diragukan lagi. Dan Guru SDN cimeong dan SDN Ganeas II kuantitas SDMnya cukup baik dalam mengajar siswa-siswinya

Dimensi Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Dari dimensi ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan khususnya dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah baik dan cukup mumpuni. Meskipun ada beberapa hal yang harus perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan Sertifikasi supaya lebih baik lagi Dan melalui karakteristik kebijakan

disimpulkan bahwa pelaksanaan seleksi sertifikasi merujuk pada aturan pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Sedangkan ditingkat daerah belum ada perda yang khusus membahas mengenai sertifikasi guru.

SIMPULAN

pelaksanaan kebijakan program sertifikasi, bahwasanya implementasi kebijakan perlu dikerjakan secara bersama dalam organisasi tanpa terkecuali agar tujuan dan harapan yang telah ditentukan dapat tercapai, hal utama tentu didukung dengan adanya sumberdaya yang baik kebijakan sertifikasi tidak boleh hanya dilihat sebagai kebijakan untuk memberikan reward kepada guru semata tapi tentu harus dibarengi dengan meningkatnya kompetensi guru serta cara dari pemerintah untuk merubah pola pikir guru menjadi lebih baik secara berkesinambungan dan sesuai alur yang ditentukan pada penelitian ini ditemukan permasalahan Sertifikasi Guru SD yaitu tidak cukupnya waktu 24 jam yang disyaratkan untuk mendapat sertifikasi dikarenakan perencanaan penerimaan pegawai yang kurang baik sehingga mengakibatkan terjadi penggemukkan karyawan dan membuat guru kelas, agama dan olahraga di tempat penelitian tidak mendapat waktu yang cukup yaitu 24 jam yang mana menjadi salah satu syarat pencairan dana sertifikasi Dan dan juga kurangnya kompetensi dari guru sehingga tidak dapat melewati tahap uji kompetensi yang mempunyai syarat minimal 7.0 serta masih adanya ijazah yang tidak linear. implementasi kebijakan sertifikasi di Kabupaten Majalengka masih memiliki sedikit kekuarangan pada factor struktur birokrasi dan komunikasi hal ini mengakibatkan masih ada guru – guru yang belum mendapatkan sertifikasi, itu terdapat pada tempat penelitian yang dilakukan yaitu di SDN Cimeong dan ganeas II untuk itu diperlukannya suatu kegiatan dari organisasi secara menyeluruh, cepat dan tepat dalam membantu guru – guru yang kesulitan dalam hal birokrasi dan informasi tentang program sertifikasi pemerintah berupa program sosialisasi dikarenakan berdasarkan hasil

penelitian masih banyak guru-guru yang masih bingung akan aturan dalam program sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, K., & Rahmayanti, E. (2015). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2(1).

Baswedan, A. R. (2014). Gawat Darurat Pendidikan Di Indonesia. *The Emergency Of Indonesian Education]. A Paper Delivered At The Meeting Between Ministry And Head Of Education Offices Indonesia-Wide In Jakarta, On December, 1.*

Kompasiana. (2018). Ini Alasan Mengapa Tunjangan Guru Sering Terlambat. Retrieved August 9, 2018, From Kompasiana.Com Website: <https://www.kompasiana.com/Didno76/5b0096accf01b47b68135d33/Ini-Alasan-Mengapa-Tunjangan-Profesi-Guru-Atau-Sertifikasi-Sering-Terlambat?Page=All>

M Nur Ali. (2018). Peringkat Pendidikan Indonesia Dan Budaya Buruknya. Retrieved September 9, 2018, From Siedoo Website: <https://siedoo.com/Berita-4965-Peringkat-Pendidikan-Indonesia-Dan-Budaya-Buruknya/>

Oktamia, D. S., & Fauziah, N. M. (2018). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 2(1), 1–19.

Oktora Melansa. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur. *Repo Unpas*, Asbtrak.

Rukiyati, R. (2013). Urgensi Pendidikan Karakter Holistik Komprehensif Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, (2), 196.

Subhan, H. (2012). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di SMA Negeri

Jatibarang Dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu. *Repo Unpas*, Abstrak.

Sunartono. (2017). Ijazah Tak Linear, Ratusan Guru Terancam Tak Bisa Ajukan Tunjangan Profesi. Retrieved September 8, 2018, From Jogjapolitan Website:

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2017/12/02/510/873491/ijazah-tak-linear-ratusan-guru-terancam-tak-bisa-ajukan-tunjangan-profesi>

Wibowo, A. W. (2018). Sebanyak 570 Ribu Guru Belum Kantongi Sertifikat Pendidik. Retrieved November 30, 2018, From Nasional.Sindonews Website:

<https://nasional.sindonews.com/read/1356048/144/sebanyak-570-ribu-guru-belum-kantongi-sertifikat-pendidik-1542640229>